

SOSIALISASI POLITIK TERHADAP PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA

Sudirman Herman^{1*}, Ihyani Malik², Riska Sari³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study aimed to determine how the material of political socialization mechanisms and patterns on the participation of first-time voters in the regional head elections in Somba Opu District, Gowa Regency. This study used qualitative research with descriptive type. The number of informants in this study were 6 people who determined by purposive sampling technique. Data collection techniques used the method of observation, interviews and documentation. The results showed that the political socialization of the participation of first-time voters in the regional head elections in Somba Opu District, Gowa Regency was optimal. community and society. In the material stage of political socialization, the sub-district election committee had been optimal, such as holding social media networking and providing all education to novice voters and the public and still implementing health protocols that had been implemented by the government. Then at the stage the political socialization mechanism was optimal, the sub-district committee conducted it in every village to recruit new voters.

Keywords: *political socialization, beginner-voter participation*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana materi mekanisme serta pola sosialisasi politik terhadap partisipasi pemilih pemula pada pemilihan kepala daerah di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 6 orang yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi politik terhadap partisipasi pemilih pemula pada pemilihan kepala daerah di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa sudah optimal hal ini terlihat pada tahap agen sosialisasi politik yang dilakukan panitia pemilihan kecamatan untuk menjaring pemilih pemula di setiap kelurahan dan melibatkan sebanyak mungkin termasuk pemilih pemula, komunitas dan masyarakat. Pada tahap materi sosialisasi politik sudah optimal yang dilakukan panitia pemilihan kecamatan seperti mengadakan penjangkaran media social serta memberikan segala edukasi kepada pemilih pemula dan masyarakat serta tetap menerapkan protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Kemudian pada tahap mekanisme sosialisasi politik sudah optimal yang dilakukan panitia kecamatan dengan melakukan di setiap kelurahan untuk menjaring pemilih pemula.

Kata Kunci: *sosialisasi politik, partisipasi pemilih-pemula*

* sudirmanherman@gmail.com

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) sering disebut sebagai pesta demokrasi yang dilakukan sebuah negara. Dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi, pemilu menjadi kunci terciptanya demokrasi. Di Indonesia pemilu merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintah. Pemilu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu diselenggarakan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Primandha Sukma Nur Wardhani (2018).

Pengaruh pemilih muda yang penting dan signifikan pada Pemilu sudah disadari oleh Partai Politik peserta Pemilu dan para calon kandidatnya. Bahkan perburuan suara pemilih muda sudah dimulai sejak Pemilu yang sudah diselenggarakan selama dua tahun terakhir yaitu banyak yang sudah mulai memperhitungkan suara dari pemilu muda dalam proses kampanye sehingga tidak jarang berbagai cara dilakukan untuk bisa menghimpun suara para pemilih muda ini. Oleh sebab itu salah satu yang harus

menjadi perhatian khusus untuk KPU adalah turut aktif meningkatkan sosialisasi politik yang masih rendah dikalangan pemilih muda agar bisa memahami prosedur dalam ketentuan Pemilihan umum. Primandha Sukma Nur Wardhani (2018).

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam negara kesatuan republik indonesia berdasarkan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Sesuai pasal 22 E ayat (2) UUD 1945, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih dewan perwakilan rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), presiden dan wakil presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).Resky Saputra (2017).

Dalam undang-undang No.10 tahun 2008 tentang pemilihan umum disebutkan bahwa pemilih pemula adalah mereka yang baru pertama kali untuk memilih dan telah berusia 17 tahun atau lebih/sudah pernah menikah mempunyai hak memilih dalam pemilihan umum.kemudian pasal 19 ayat (1 dan 2) UU no.10 tahun 2008 menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga

negara indonesia yang terdaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemunggutan suara telah genap berumur tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin (Resky Saputra, 2017).

Pemilihan kepala daerah secara langsung telah berlangsung sejak tahun 2005, yang di dasarkan pada ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 dengan berlandaskan pada ketentuan pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menentukan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing – masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis ketentuan pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tersebut tidak menegaskan keharusan bahwa Gubernur, Bupati, Dan Walikota harus dipilih melalui suatu pemilihan yang dilaksanakan secara langsung. Akan tetapi, Menurut Rozali Abdullah, Oleh karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Republik Indonesia, maka dalam melakukan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah seharusnya sinkron dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yaitu melakukan pemilihan langsung. Winny Anggreny R (2016).

Pemilihan umum dapat dikatakan sebagai salah satu sarana demokrasi dan bentuk perwujudan kedaulatan rakyat

untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemimpin yang aspiratif, berkualitas serta bertanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat. Suatu kategori kelompok pemilih yang sangat menarik untuk diamati dan diteliti lebih jauh Pemilih pemula adalah pemilih yang baru pertama kali akan memberikan suaranya dalam pemilu seperti yang dijelaskan di dalam pemilu dan pemilih pemula modul 1 komisi pemilihan umum (2013) kategori pemilih pemula warga negara yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya didalam kegiatan pemilihan umum mereka berasal dari warga negara indonesia (WNI) yang genap berusia 17 tahun atau belum berusia 17.

Berbagai macam permasalahan yang terjadi dilapangan maka dapat menjadi dasar penelitian untuk melakukan analisis lebih jauh mengenai tiga kecamatan dengan mengetahui tingkat partisipasi terendah pada pemilih pemula yaitu kecamatan somba opu 65.67, kemudian pallangga 68.62 persen, lalu kecamatan Biringbulu 71.16 persen, maka sosialisasi harus dilakukan untuk meningkatkan partisipasi baik dengan cara *door tu door* ataupun metode-metode lainnya, dalam memberikan pemahaman kepada pemilih pemula tentang pentingnya penggunaan hak suara

terhadap kemajuan partisipasi politik agar tingkatan sosialisasi semakin jauh lebih baik dari sebelumnya.

Menurut Abdulsyani (2007) sosialisasi adalah proses belajar yang dilakukan oleh seseorang untuk berbuat dan bertingkah laku berdasarkan patokan yang terdapat dan diakui dalam masyarakat. Dalam proses belajar atau penyesuiandiri seseorang untuk mengadopsi kebiasaan, sikap dan ide-ide dari orang lain, kemudian seseorang mempercayai dan mengakui sebagai milik pribadinya. Jika sosialisasi dipandang dari sudut masyarakat, maka sosialisasi di maksudkan sebagai usaha untuk memasukkan nilai-nilai kebudayaan terhadap individu sehingga individu tersebut menjadi bagian dari masyarakat.

Menurut Soekanto (2009) Adalah proses mengkomunikasikan kebudayaan kepada warga masyarakat yang baru. Sedangkan Menurut Efriza (2012) Berpendapat bahwa sosialisasi politik merupakan bagian dari suatu proses sosial. Sosialisasi adalah suatu kegiatan pengajaran dan pendidikan yang dilakukan individu atau suatu kelompok kepada individu atau kelompok lainnya yang berlangsung secara alamiah. Pada prosesnya, pengajaran dan pendidikan itu bersinggungan dengan nilai-nilai politik yang melekat pada setiap

individu tersebut akan berbeda. Selanjutnya dijelaskan bahwa proses terhadap individu-individu sampai pada kadar yang berbeda, salah satunya biasa terlihat dalam satu sistem politik yaitu partisipasi politik.

Studi-studi sosialisasi tentunya menarik dan penting, studi ini dapat membantu kita memahami dasar-dasar dukungan terhadap suatu sistem politik Menurut Cottam dkk (2012) Sosialisasi politik merupakan satu konsep yang menentukan perilaku politik masyarakat Menurut Pribadi dkk (2010) Sosialisasi politik adalah bagian dari proses sosialisasi yang khusus membentuk nilai-nilai politik, yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing anggota masyarakat berpartisipasi dalam sistem politik Menurut Almond Mas'ood dan Mac Andrews (2008) Setiap keberhasilan suatu proses sosialisasi politik ditentukan oleh faktor lingkungan dan keterkaitan unsur-unsur yang mempengaruhinya.

Menurut Budiarto (2008) Sebagai defenisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara serta secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).

Sedangkan menurut Closky sebagaimana dikutip Budiarjo (2008) bahwa partisipasi politik yaitu kegiatan suka rela dari warga masyarakat melalui mana yang mengambil bagian dari proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam membentuk kebijakan umum.

Menurut Tami Legowo Sitepu (2012) Partisipasi politik adalah suatu kegiatan warga Negara dengan secara sengaja maupun tidak sengaja yang berkaitan erat dengan kebijakan-kebijakan sistem politik atau pemerintah. Dalam hal ini dapat dilakukan secara individual maupun secara kelompok, secara spontan maupun mobilisasi legal maupun illegal sifatnya.

Menurut Hebert Mc Closky Sinaga (2013) Memberikan defenisi sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat dengan melalui dimana mereka mengambil dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung maupun secara tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan-kebijakan umum. Oleh sebab itu di negara-negara demokrasi pada umumnya dianggap bahwa partisipasi masyarakat lebih banyak, maka akan lebih baik. Dalam implementasi tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga Negara

mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan namun terlepas dari gambaran tersebut, keinginan mereka dalam berpartisipasi saat memberikan suara pada penyelenggaraan pemilu merupakan potensi yang cukup signifikan. Selain besarnya jumlah pemilih pemula, potensi untuk memperoleh suara mereka dapat dilihat dari antusiasmenya dalam mengikuti pemilu pertama kali.

Menurut Arifin Anwar (2011) membagi juga partisipan politik dalam dua bentuk, yaitu: partisipan pengamat dan partisipan mitra berdasarkan pengalamannya di lapangan, dijelaskan bahwa pada umumnya partisipan pengamat adalah kalangan akademisi yang memiliki minat, pengetahuan dan kompetensi, serta rajin mengikuti perkembangan politik secara kritis, sebagai khalayak media massa. Mereka juga sering menyatakan pendapat atau komentar secara terbuka melalui pers, radio, dan televisi, tetapi tidak mau terlihat dalam kegiatan politik praktis. Sedangkan partisipan mitra pada umumnya adalah aktivis atau orang yang ingin menjadi aktivis sehingga melibatkan diri dalam kegiatan politik

sebagai mitra politikus. Mereka juga khayalak media massa, yang aktif dalam politikus praktis, karena mungkin diberi tugas dan fungsi sebagai “tim sukses” oleh politikus.

Menurut Huntington dan Nelson Budiarto (2008) partisipasi politik adalah dapat bersipat otonomi dan mobilisasi partisipasi politik bersifat otonom yaitu partisipasi politik yang didasarkan pada kesadaran politik setiap warga menentukan pilihan partisipasi politik yang bersipat mobilisasi yaitu partisipasi politik mobilisasi atau dikerahkan oleh pihak lain, jadi partisipasi otonom dilaksanakan berdasarkan kepada kesadaran politik setiap orang tanpa adanya paksaan ancaman ataupun pengerahan. partisipasi politik otonom murni muncul atas dorongan atau kehendak pribadi. Sedangkan partisipasi politik yang dimobilisasi merupakan partisipasi politik yang dilakukan oleh karena dikerahkan biasanya partisipasi yang dimobilisasi tidak berdasarkan pada kesadaran pribadi, tetapi terjadi melalui paksaan ancaman bahkan tindakan kekerasan lainnya dengan maksud mengubah pilihan warga.

Adapun menurut Maran Milbraht (2007) menyebutkan 2 faktor utama yang mendorong orang untuk berpartisipasi politik, bahwa adanya

faktor pendukung dan faktor penghambat dimana dalam faktor pendukung terdapat 5 unsur diantaranya adanya perangsang politik, karakteristik pribadi seseorang, karakteristik sosial, situasi atau lingkungan politik faktor penghambat, dan pendidikan politik. Dari dua faktor utama yang dikatakan milbrath terdapat faktor penghambat juga yang mendorong orang yang tidak berpartisipasi politik, unsur yang ada dalam faktor penghambat tersebut yaitu kebijakan induk yang selalu berubah, pemula yang otonom, dan dukungan yang kurang dari induk organisasi untuk mensukseskan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan mulai pada tanggal 27 April 2020 sampai tanggal 29 Juli 2020 terkait sosialisasi politik terhadap partisipasi pemilih pemula pada pemilihan kepala daerah di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sosialisasi politik terhadap partisipasi pemilih pemula pada pemilihan kepala daerah di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian Deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan secara deskriptif bagaimana mengetahui sosialisasi politik terhadap partisipasi pemilih pemula pada pemilihan kepala daerah di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

Selama melakukan penelitian, penulis mengumpulkan informasi mengenai *teknik purposive sampling* dengan kriteria yaitu mempunyai pemahaman dengan masalah yang diteliti. Adapun informan yang dimaksud adalah komisi pemilihan umum, pemuda, partai politik masyarakat di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa adapun alasan saya memilih ke 6 informan dibawa ini karena sudah sangat cukup efektif melakukan penelitian walaupun hanya sedikit informan yang saya gunakan bukan berarti bahwa saya katakan lebih bagus namun inilah sesuai dengan apa yang saya lakukan pada saat proses penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wilayah Kecamatan Somba Opu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Tamalete dan wilayah Kecamatan Bontomarannu.

Dengan dibentuknya Kecamatan Somba Opu maka wilayah Kecamatan Tamalete dan wilayah Kecamatan Bontomarannu dikurangi dengan wilayah kecamatan Somba Opu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kecamatan Somba Opu merupakan Kecamatan Ibu Kota Kabupaten Gowa yang terletak di Jalan Sirajuddin Rani No. 71, Kelurahan Bonto-bontoa.

Kecamatan Somba Opu dipimpin oleh seorang Camat dengan membawahi Staf yang berjumlah 25 orang, dengan jumlah PNS sebanyak 16 orang dan Tenaga Honorer sebanyak 9 orang.

Pemerintah Kecamatan Somba Opu dalam era Mileneal ini telah mempunyai Media Sosial dan Website untuk memudahkan masyarakat, terkhusus Wilayah Kecamatan Somba Opu untuk mengetahui Kegiatan ataupun Berita terupdate tentang keadaan Kecamatan Somba Opu.

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi sangat terkait dengan cita-cita atau keinginan suatu daerah untuk menggunakan seluruh potensinya yang dideskripsikan secara jelas dan ringkas yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui implementasi rencana strategis yang telah ditetapkan.

Untuk menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan harus dirumuskan suatu keadaan yang diinginkan organisasi untuk selanjutnya dituangkan dalam suatu visi yang berkaitan dengan kondisi masa depan yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Di dalam perjalanan organisasi, visi memegang peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga organisasi dapat bergerak maju menuju masa depan lebih baik.

Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan Somba Opu sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, maka merumuskan visi Kecamatan Somba Opu yang mempunyai peran dan fungsi dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan serta dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah sebagaimana diuraikan terutama dikaitkan dengan pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang secara mutlak harus didukung oleh sumber daya manusia aparatur yang mampu mengelola tugas-tugas pelayanan secara optimal, efektif dan efisien serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Gowa sebagai perwujudan organisasi pemerintah daerah, telah mengejawantahkan nilai-nilai kultural dan historis yang dimiliki menjadi sumber inspirasi dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Bertitik tolak dari nilai filosofi itu pula yang mendasari pembangunan Kabupaten Gowa untuk mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai dalam perspektif jangka panjang sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025.

Berikut ini adalah ulasan mengenai hasil penelitian yang diperoleh di lapangan baik melalui observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai sosialisasi politik terhadap partisipasi pemilih pemula pada pemilihan kepala daerah di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut:

Agen Sosialisasi Politik

Agen sosialisasi politik merupakan bagian dari perwakilan atau perantara dalam sebuah instansi pemerintahan untuk menitipkan segala keperluan dari pihak manapun selagi

dalam proses melakukan sesuatu yang beredukasi terhadap masyarakat.

Berdasarkan hasil kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam tahap agen sosialisasi ini belum maksimal melakukan sosialisasi karena masih banyak kendala yang harus ditempuh untuk bisa mencapai sosialisasi ini agar tetap efektif salah satunya untuk memberikan semangat dalam giat bekerja serta dari tahun ke tahun mampu meningkatkan kualitas sosialisasi terhadap pemilih pemula ini agar nantinya bisa menghasilkan generasi yang berkualitas dalam keterlibatan di setiap pemilihan kepala daerah.

Berdasarkan hasil kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa sudah cukup bagus dalam melakukan pembagian teknis untuk melakukan kerja sama agar penerapan agen sosialisasi politik namun salah satu menjadi belum maksimal adalah terkait dengan persoalan jenjang yang dilakukan oleh panitia pemilihan kecamatan belum menyakinkan karena belum bisa memberikan terobosan baru untuk pemilih pemula dan masyarakat maka dari itu salah satu tugas utama panitia pemilihan kecamatan adalah menambah jenjang baru lagi yang diberikan kepada yang bersangkutan agar nantinya bisa lebih eksis lagi agar

pemilihan kepala daerah ini bisa lebih baik kedepan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dari beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme sosialisasi politik sudah optimal yang telah dilakukan panitia pemilihan kecamatan seperti sosialisasi di setiap kelurahan untuk menjangkau pemilih pemula dalam meningkatkan minat kesadaran pemilih pemula dan seluruh masyarakat untuk mengetahui secara luas pemilihan kepala daerah. Kemudian panitia pemilihan kecamatan mengajak pemilih pemula dan seluruh masyarakat agar mengembangkan potensi dalam partisipasi terhadap pemilihan kepala daerah.

Materi Sosialisasi Politik

Materi sosialisasi politik adalah informasi politik yang disampaikan terhadap sesuatu yang bersifat jelas agar kebutuhan setiap materi yang disosialisasikan terhadap pemilih pemula tersaji secara merata agar bisa berkembang secara efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil kutipan wawancara di atas bahwa untuk perencanaan dan yang sangat diperlukan dalam pemilihan adalah generasi pemilih pemula yang harus didorong agar nantinya bisa menghasilkan pemilih pemula yang bisa berkompeten

dalam setiap kegiatan yang di laksanakan panitia pemilihan kecamatan dan ikut kerja sama dalam setiap partisipasi dalam pemilihan kepala daerah maka dari itu yang paling utama adalah mampu menghasilkan generasi pemilih pemula yang cerdas demi kemajuan bangsa dan negara.

Berdasarkan hasil kutipan wawancara di atas bahwa sudah lebih efektif menjalankan tugas didalam situasi seperti ini karena mereka terkendala tatap muka terkait covid 19 ini jadi solusii yang mereka laksanakan agar materi sosialisasi politik ini bisa tetap berjalan dengan maksimal adalah menggunakan media sosial untuk memberikan informasi kepada pemilih pemula dan seharusnya panitia pemilihan kecamatan mampu berfikir ke jenjang lebih jauh untuk bagaimana system generasi pemilih pemula nantinya bisa di kembangkan dan di ajarkan materi dasar yang mudah di pahami di setiap ruang belajar supaya bisa mencetak pemilih pemula yang berintegritas.

Berdasarkan hasil kutipan wawancara di atas bahwa pemilih pemula harus diberikan materi yang baik guna melihat dan paham untuk memilih pemimpin yang berintegritas untuk nantinya materi sosialisasi politik ini bisa jadi bahan agar pemilih

pemula makin paham dalam kondisi memilih pemimpin di khususnya di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dalam hal ini yang lebih penting adalah keterlibatan pemilih pemula dan masyarakat ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan panitia pemilihan kecamatan.

Berdasarkan hasil kutipan wawancara di atas bahwa panitia pemilihan kecamatan setiap pemilihan kepala daerah wajib memberikan edukasi berupa informasi yang riil supaya masyarakat lebih paham kinerja materi sosialisasi politik yang disuguhkan kepada masyarakat agar tingkat kepuasan masyarakat lebih ditingkatkan lagi agar kiranya tetap memberikan yang terbaik.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dari beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa materi sosialisasi politik sudah optimal dapat dilihat dari kemampuan panitia pemilihan kecamatan memunculkan gagasan atau ide-ide baru untuk mengatasi setiap persoalan disetiap keadaan seperti mengadakan penjangingan media social, melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk hadir langsung di setiap kelurahan agar mengetahui materi yang di lakukan seperti memberikan tata cara pemilihan kepala daerah dan ikut serta

memberikan segala edukasi kepada pemilih pemula dan masyarakat serta tetap menerapkan protocol kesehatan yang telah diterapkan pemerintah.

Mekanisme Sosialisasi Politik

Mekanisme sosialisasi politik adalah melakukan sesuatu pekerjaan untuk memberikan dorongan secara sadar dan segala tiruan yang bersipat mendukung dalam melaksanakan tugas dalam upaya menciptakan tatanan masyarakat yang berintegritas.

Berdasarkan hasil kutipan wawancara di atas bahwa berapa tahapan strategi yang akan diterapkan panitia pemilihan kecamatan ini berupa akan memasifkan pemilih pemula dan akan dikembang jauh lebih baik dari sebelumnya semoga angka partisipasi pemilih pemula terkhusus di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa bisa melonjak dari angka sebelumnya.

Berdasarkan hasil kutipan wawancara di atas bahwa tidak jauh bedah pendapat dari ketua panitia pemilihan kecamatan sama berbicara persoalan kemajuan strategi yang ingin di relasikan di kemudian hari seharusnya ada korelasi antara semua jajaran paniti pemilihan kecamatan agar kiranya sosialisasi ini bisa di kedepankan kerja keras dan bekerja sama dalam memilih pemilih pemula

yang sudah bisa di berikan arahan tentang pentingnya pemilih pemula terlibat partisipasi dalam pemilihan kepala daerah.

Berdasarkan hasil kutipan wawancara di atas bahwa sungguh sangat menarik ungakapan dari partai politik dia menjelaskan tentang bagaimana keterlibatan partai politik dalam melakukan pemilih pemula berapa langkah yang harus di lakukan dan membutuhkan waktu untuk mengoptimalkan supaya mekanisme yang diterapkan untuk pemilih pemula ini bisa teralisasi dengan baik sekaligus mendukung adanya partisipasi masyarakat supaya pemilihan kepala daerah nantinya bisa lebih progresif agar setiap pemilihan kepala daerah lebih mengarah dari keterlibatan pemilih pemula dan masyarakat.

Berdasarkan hasil kutipan wawancara di atas bahwa cepat relasikan program panitia pemilihan kecapatan agar masyarakat dapat merasakan mekanisme politik ini dan panitia pemilihan kecamatan tetap teliti dalam memahami setiap kegiatan yang akan di laksanakan dan benar benat melaksanakan sesuai kemampuan pemilih pemula agar tidak lagi buta akan mekanisme sosialiasi dan nantinya bisa lebih mengarah ke jenjang lebih baik.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dari beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme sosialisasi politik sudah optimal yang telah dilakukan panitia pemilihan kecamatan seperti sosialisasi di setiap kelurahan untuk menjangkau pemilih pemula dalam meningkatkan minat kesadaran pemilih pemula dan seluruh masyarakat untuk mengetahui secara luas pemilihan kepala daerah. Kemudian panitia pemilihan kecamatan mengajak pemilih pemula dan seluruh masyarakat agar mengembangkan potensi dalam partisipasi terhadap pemilihan kepala daerah.

Pola Sosialisasi Politik

Pola sosialisasi politik adalah suatu proses untuk mengetahui sosialisasi yang secara teratur dalam mewujudkan gambaran yang dipakai dalam bentuk atau model yang memiliki keteraturan yang baik.

Berdasarkan hasil kutipan wawancara di atas bahwa langkah yang dilakukan panitia pemilihan kecamatan sebaiknya menggunakan media sosial saat melakukan pola sosialisasi sudah layaknya berbasis online karena di Indonesia sudah lebih moderen kemajuan teknologi dan informasinya jadi panitia pemilihan benar berfikir untuk bagaimana bisa

generasi pemilih pemula tidak buta lagi akan teknologi itulah tugas yang harus di perhatikan sebaik mungkin agar bisa lebih di upayakan kearah yang lebih bagus.

Berdasarkan hasil kutipan wawancara di atas bahwa panitia pemilihan kecamatan perlu gerakan cepat untuk mencari solusi untuk bagaimana bisa tetap berjalan pola sosialisasi politik kepada pemilih pemula ini supaya tetap optimal dalam kondisi seperti ini panitia pemilihan kecamatan juga harus memikirkan secara dalam karena dalam keadaan pandemi ini harus tetap dijalankan sesuai dengan kinerja panitia pemilihan kecamatan agar nantinya pola sosialisasi ini bisa terarah dengan baik.

Berdasarkan hasil kutipan wawancara di atas bahwa dalam peninjauan ini panitia pemilihan kecamatan perlu lebih lugas dan tangkas untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat agar bisa merasakan pola sosialisasi politik yang baik dan nantinya masyarakat bisa menilai dengan baik kinerja panitia pemilihan kecamatan supaya ada bahan evaluasi yang kita dapatkan kedepan untuk bisa lebih memaksimalkan kinerja agar mampu memberikan arahan masyarakat dengan baik dan terarah.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dari beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa pola sosialisasi politik sudah cukup baik dapat dilihat dari kesungguhan panitia pemilihan kecamatan yang dilakukan untuk mensosialisasikan kegiatan seperti membuat sticker dan sosialisasikan ke setiap kelas 2 dan 3 sekolah menengah atas agar generasi pemilihan pemula, seluruh lapisan masyarakat, panitia pemilihan kecamatan, bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 2007. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Arifin. Anwar. 2011. *Komunikasi Politik (Filsafat - Paradigma - Teori – Tujuan – Strategi Dan Komunikasi Politik Indonesia)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Asmika, Rahman. 2017. *Peran Sekolah Sebagai Sarana Sosialisasi Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilih Pemula*, Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan. Di akses Pada Tgl 11 November 2017
- Azwar, Rully Chairul, 2007. *Partai politik, Polkada, dan Media Massa*. *Jurnal Konstitusi*, 4,(1), 228-236.
- Budiarjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Cottam, dkk. 2012. *Pengantar Psikologi Politik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Efriza. 2012. *Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Alfabeta.
- Harjana, Andre. 2016. *Komunikasi Organisasi, Strategi dan Kompetensi*. Jakarta: Kompas.
- Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Maran, Milbraht. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Asdi Mahasatya.
- Mas'oed, McAndrews. 2008. *Perbandingan Sistem Poitik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Masmuh. 2008. *Komunikasi Organisasi Dalam Perspektif dan Praktek*. Malang: UNM Press.
- Muhammad, Arni. 2007. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pribadi, dkk. 2010. *Model Desain Sistem Pembelajaran*. Jakarta: Dian Aksara.
- Rezeky, Saputra. 2017. *Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Presiden Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis tahun 2014*, Vol 4 No. 1 Di akses Pada Pebruari 2017.
- Rush, dkk. 2007. *Penghantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sinaga. 2013. *Perkembangan UKM Dihambat Birokrasi Perizinan*. Di akses pada 12 Desember 2019. <http://economy.okezone.com>
- Sitepu. 2012. *Penulisan Buku Teks Pelajaran*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Baru. Jakarta: Rajawali Pers.